|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Metro Sulawesi | KasubaudSulteng II |
| Hari, tanggal | : | Selasa, 4 November 2014 |
| Keterangan | : | DPRD memanggil 4 instansi terkait pengaduan masyarakat |
| Entitas | : | Morowali |

**Morowali, Metrosulawesi.com –** Komisi III DPRD Morowali, Sulawesi Tengah, memanggil instansi terkait dijajaran pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Pemanggilan itu terkait masalah pasokan listrik, penerbitan sertifikat, dan pembangunan jembatan di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku Timur.

Instansi terkait yang dipanggil adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam rapat dengar pendapat di ruang komisi III, Selasa (04/11/2014).

Sebelumnya, pada Senin (03/11/2014), komisi III telah menerima pengaduan dari masyarakat dan pemerintah Desa Onepute Jaya. Intinya adalah mengadukan masalah pasokan listrik, penerbitan sertifikat, dan pembangunan jembatan, yang hingga kini tak pernah tuntas.

Dalam rapat dengar pendapat itu, yang mengerucut adalah masalah penerbitan sertifikat pekarangan dan lahan satu. Karena sertifikat yang diterbitkan BPN belum semuanya terpenuhi. Bahkan, data yang disampaikan pemerintah desa berbeda dengan BPN.

Kepala Desa Onepute Jaya, Jalam, menyampaikan data pekarangan dan lahan satu yang belum memiliki sertifikat sejumlah 639. Sementara menurut Kepala BPN Rifai Baedhawi, ada 452 yang belum mendapatkan sertifikat. Dari pihak Dinsosnakertrans, Rusli, malah menyebutkan agar penerbitan sertifikat itu diajukan dalam RAPBD 2015.

Praktis, masalah data itu memicu tanggapan dan pertanyaan dari komisi III. Ketua Komisi III Asgar Ali, meminta perbedaan data itu diklarifikasi dan disingkronkan antara pihak BPN dengan pemerintah Desa Onepute Jaya. Bahkan, dia meminta dijelaskan apa yang menjadi masalah sampai saat ini sertifikat tidak terbit. Lagi pula masyarakat Desa Onepute Jaya sudah menunggu 20 tahun lamanya.

Wakil Ketua Komisi III, Kuswandi, meminta pihak BPN dan Dinsosnakertrans untuk segera menyelesaikan penerbitan sertifikat itu. Lagi pula masalah itu sudah menjadi tanggung jawab kedua instansi terkait. Dia juga menegaskan, penerbitan sertifikat itu tidak perlu lagi dibebankan ke APBD, karena sudah menjadi tanggung jawab negara melalui BPN.

Hal senada ditegaskan Silahudin Karim, anggota komisi III. Dia mempertanyakan kenapa sebagian sertifikat diterbitkan dan lainnya tidak diterbitkan.

“Ini yang menjadi pertanyaan kita. Dan tidak perlu lagi dianggarkan di APBD, karena ini sudah menjadi tanggung jawab BPN dan Nakertrans untuk menyelesaikan. Persoalan ini juga ada di Nakertrans, seharusnya menghadirkan kepala dinas yang benar-benar paham dengan persoalan ini,” tandas politisi Golkar ini.

Pihak BPN meminta diberikan kesempatan berkoordinasi dengan BPN wilayah, terkait data untuk sertifikat yang belum diterbitkan. Bahkan, Kepala BPN Rifai Baedhawi, berjanji untuk menuntaskan masalah itu. Komisi III memberikan kesempatan, dan meminta agar tahun depan tidak ada lagi masalah sertifikat masyarakat yang belum diterbitkan di Desa Onepute Jaya.

Sementara, terkait masalah pasokan listrik maupun pembangunan jembatan di Desa Onepute Jaya, akan dianggarkan dalam APBD 2015. Hal itu disampaikan Asgar Ali dan Kuswandi. Kedua mantan aktivis itu mengaku tidak ada masalah, karena komisi III telah membahas hal itu dengan dinas ESDM dan dinas PU.